

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan yang peneliti peroleh di lapangan, maka untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan peneliti akan mengungkapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan izin trayek angkutan kota di Kota Sukabumi, komunikasi yang terjalin antara instansi yang terlibat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 kurang optimal, karena walaupun dilakukannya rapat koordinasi setiap triwulan dan komunikasi internal sudah dilakukan dengan baik, namun sosialisasi terkait perda kepada pemilik angkutan kota dan supir angkutan kota masih belum dilakukan sehingga masih banyak pemilik angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayeknya dan supir angkutan kota yang melakukan pelanggaran.
2. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan perda retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan kota Sukabumi sudah baik karena walaupun dari segi kuantitas masih belum terpenuhi dan harus ditambah dengan tenaga harian lepas namun dari segi kualitas sudah baik sehingga bisa menutupi kekurangan yang ada melakukan pelayanan.
3. Disposisi yaitu sikap dan kecenderungan para pelaksana kurang optimal. Pegawai memberikan pelayanan dengan baik dan ramah, namun masih ada

yang kurang professional dalam menjalankan tugasnya, ini dilihat dari hasil wawancara mengenai dimensi disposisi.

4. Struktur birokrasi yang ada pada pelaksanaan Perda di Dinas Perhubungan kota Sukabumi kurang optimal dikarenakan belum adanya SOP mengakibatkan pelayanan yang diberikan tidak berdasar kepada prosedur yang jelas.
5. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan kota Sukabumi dalam implementasi kebijakan tentang retribusi izin trayek yaitu:
 - a. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada pemilik dan supir angkutan kota, kurangnya sumber daya manusia yang ada, kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga masih banyak yang tidak melakukan perpanjangan izin trayek, dan tidak terdapatnya SOP.
 - b. Faktor pendukung yaitu adanya komunikasi yang baik antar sesama instansi selaku stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan, sudah tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan izin trayek angkutan kota pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, dan adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini dengan saran teoritis dan juga praktis, dengan harapan semoga dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelayanan izin trayek angkutan kota, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi antara lain:

5.2.1 Saran Praktis

Saran praktis yang peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilik angkutan kota dan supir angkutan kota tentang perda retribusi izin trayek dan sanksi apa yang akan diberikan bila terdapat pelanggaran, agar masyarakat menjadi sadar dan peduli akan hal tersebut dan pelaksanaan perda tersebut bisa berjalan dengan lebih baik.
2. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan kota Sukabumi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi izin trayek harus diiringi dengan kuantitas yang memadai, karena kualitas dan kuantitas SDM dibutuhkan untuk implementasi perda tersebut.
3. Disposisi yang berkaitan dengan profesionalisme harus ditingkatkan.
4. Struktur birokrasi yang berkaitan dengan SOP yaitu harus adanya SOP yang jelas sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

5.2.2 Saran Teoritis

Peneliti menyarankan pada penelitian lanjutan mengenai analisis kebijakan penyelenggaraan izin trayek di Kota Sukabumi. Sehingga dapat diketahui lebih dalam mengenai penyelenggaraan izin trayek di Kota Sukabumi.